

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Problematik di Desa Ngumbul

Secara administratif desa Ngumbul terbagi dalam rukun tetangga sejumlah 34 RT dan rukun warga sejumlah 9 RW. Berdasarkan laporan “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2017”, total penduduk desa sejumlah 5.545 orang dengan klasifikasi 2804 laki-laki dan 2741 perempuan. Wilayah desa Ngumbul terbagi dalam 4 dusun, yaitu: dusun Krajan, dusun Jeruk, dusun Ngagik, dan dusun Bandarangin dengan luas wilayah desa adalah 924 Ha meliputi lahan sawah 170 Ha, lahan ladang 162.95 Ha, lahan perkebunan 40.13 Ha, hutan 270 Ha dan lahan lainnya seluas 280 Ha (detail profil Desa Ngumbul dapat dilihat pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 8).

Secara geografis Desa Ngumbul terletak pada dataran tinggi dengan topografi wilayah berupa perbukitan dan wilayah terbesarnya berada di lembah (lihat peta Desa Ngumbul pada lampiran 9). Kondisi demikian menjadikan desa Ngumbul berada dalam resiko tinggi bencana tahunan berupa langganan bencana tanah longsor, pergeseran tanah, dan tanah retak (Tukijan, 2018).



Gambar 4.1 Titik longsor di dusun Ngagik desa Ngumbul

Peristiwa bencana alam pernah dialami Bahrudin (40), Toiran, Solikin dan Sarnen (dokumentasi peristiwa bencana tanah longsor dapat dilihat pada lampiran 10). Kejadian tanah longsor terjadi pada tanggal 15 desember 2018 sekitar pukul 19.30 WIB

sebagaimana Gambar 4.1. Sarnen (60) seorang warga korban longsor dari RT. 01/ RW. 06 dusun Ngagik mengatakan bahwa,

“Desa kami seringkali mengalami bencana tanah longsor. Longsor yang terjadi pada sabtu malam kemarin membuat saya sekeluarga panik, saat tebing setinggi 10 meter samping rumah tiba-tiba longsor. Kami pun sangat cemas karena tembok bagian samping rumah saya jebol diterjang longsoran material tanah”.

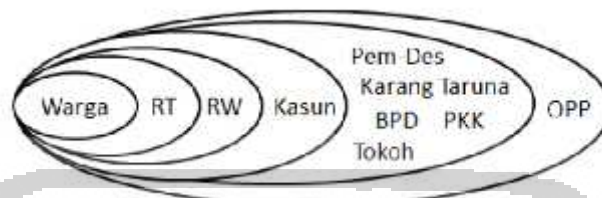
Tahun sebelumnya, hari rabu-kamis tanggal 28-29 november 2017 terjadi peristiwa tanah longsor yang lebih parah. Tukijan selaku kepala desa di dalam keprihatinan yang mendalam, menginformasikan dan menyampaikan hal-hal berikut ini kepada seluruh warga masyarakat,

“Dari 70 rumah yang terdampak di dusun Krajan, Ngagik, Jeruk dan Bandarangin, terdapat sekitar 20 rumah mengalami kerusakan parah dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Selain tertimbun material longsor, sebagian mengalami pergeseran tanah dan tanah mengalami retak di beberapa titik. Saya mengingatkan kepada seluruh warga bahwa longsoran tersebut membawa dampak munculnya retakan-retakan tanah baru di beberapa titik rumah warga, area pekarangan dan pertanian. Retakannya kian merembet ke pemukiman dan area pertanian warga. Beberapa titik terdampak sudah tidak layak untuk dihuni, karena bisa mengancam keselamatan warga”.

Dampak longsor berupa material tanah dan batu gunung yang berada pada kemiringan bukit di bagian samping, menerjang pemukiman warga, memutus akses jalan desa, merusak jalan rabat desa, talud dan infrastruktur desa lainnya (peta rawan bencana dapat dilihat pada lampiran 11 dan lampiran 12). Kejadian tersebut membutuhkan penanganan yang cepat, akurat, dan koordinasi yang *intens* dari segenap *stakeholder* desa dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan dan perkembangan wilayah desa, seluruh dusun, dari waktu ke waktu.

Faktor alam yang kurang menguntungkan bagi Desa Ngumbul tersebut memberi inspirasi kepada dua JW untuk mencari solusi dari persoalan kritis yang sedang dihadapi seluruh masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi dengan tetangga, warga desa, RT, RW, Kasun, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, perangkat desa, dan kepala desa untuk mendapatkan perhatian dari problematik yang muncul sebagai permasalahan *urgen* yang harus segera diselesaikan. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara kontinu dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan berkesinambungan.

Model hubungan kemasyarakatan antar dan inter warga desa Ngumbul dalam mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh dusun di desa Ngumbul dimodelkan dengan Gambar 4.2



Gambar 4.2 *Socio-relationship* kemasyarakatan desa berdasarkan model ANT

Hasil pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumen diolah untuk membuat tahapan translasi yang dilakukan oleh para aktor. Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis keberhasilan penerapan SID di Desa Ngumbul dalam perspektif ANT adalah melakukan identifikasi para pelaku atau aktor yang terlibat di dalam proses translasi (Callon, 1986). Dalam penerapan SID tersebut ditemukan dua JW selaku *obligatory passage points* (OPP) atau aktor utama atau aktan, melakukan pendekatan kepada calon aktor yang bersedia bekerjasama (ada aktor yang menolak) dalam menyelesaikan atau mencari solusi antisipatif terhadap bencana alam yang terjadi. *Moment of problematization* terjadi pada saat OPP melakukan inisiasi kepada seluruh warga masyarakat. OPP bergabung dengan semua entitas yang ada untuk mendefinisikan dengan cermat permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dan kecenderungan aktor yang terlibat. Aktor utama mengajak atau menarik aktor lain, dapat diartikan bahwa mereka membangun sebuah jaringan baru dalam perspektif ANT.

Pada *moment of problematization*, jaringan *actor-network* belum terbentuk, antar aktor dalam proses penjajakan. Namun, OPP melakukan inisiasi terus-menerus, secara berkesinambungan dengan mengangkat isu kritis yang dihadapi supaya mendapat perhatian dari masyarakat. Dua JW mengajak warga untuk mendata permasalahan yang ada dan mentransformasikan permasalahan yang muncul ke dalam solusi penyelesaian.

4.2 *Moment of Interessement*

Interresemment merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas. Aktor utama mendorong keterlibatan aktor-aktor baru dengan melakukan identifikasi berdasarkan momen problematisasi. Solusi preventif dan antisipatif dari bencana yang melanda di

semua dusun di Desa Ngumbul adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar warga agar informasi yang berkembang dapat dipantau oleh seluruh warga.

Berdasarkan mufakat warga desa, keputusan yang dipilih untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi adalah membentuk komunitas informasi. Peristiwa bencana tanah longsor dan tanah retak yang melanda, menjadi sebab lahirnya komunitas informasi yang berasal dari masyarakat. KIM Pena sebagai komunitas informasi merupakan panggilan nurani warga akan tersemainya arti kebersamaan, rasa saling memiliki, saling berinteraksi, menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap desa yang menjadi rumah bagi seluruh warga. KIM Pena merupakan wadah pemberdayaan, penyampai informasi, penyalur aspirasi masyarakat yang berawal dari kebutuhan yang sama akan informasi. Aktivitas komunitas ini memiliki semangat yang tergambar pada *taglines*-nya “Berbagi Cerita Bersama Warga”. Miskun, ketua KIM Pena saat menyambut 34 KIM dari Kabupaten Wonogiri, Rabu 28 November 2018, mengatakan,

“KIM Pena ini lahir dari rasa kebersamaan, kepedulian dan kebutuhan bersama akan sebuah jalinan komunikasi antar warga dan pemerintah desa. Dari situlah kami berupaya terus memupuk semangat agar KIM ini tidak sekedar menjadi tempat berkumpul semata, namun ada peran yang harus dijalankan, yaitu sebagai agen informasi, menjembatani akses komunikasi antar warga sekaligus sebagai mitra pemerintah desa. KIM Pena mampu menjalankan fungsinya sebagai komunitas dari, oleh dan untuk masyarakat dalam mewujudkan gerakan informasi desa”.

Lebih lanjut Miskun menyampaikan perjalanan komunitas ini,

“Awalnya anggota patungan dalam setiap menjalankan kegiatan, menyisihkan anggaran seadannya dari masing-masing anggota, karena kami menyadari KIM Pena ini lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah pemerintah desa sangat terbuka dan menyambut baik terbentuknya KIM Pena. Setelah dua tahun berjalan, pemerintah desa mulai mendorong penguatan KIM Pena lewat anggaran pemberdayaan yang bisa diakses melalui dana desa. KIM Pena juga ikut mendorong keterbukaan informasi baik lewat pengelolaan website desa maupun website KIM, dimana anggota KIM dilibatkan dalam memperkuat akses informasi di SID”.

Komunitas KIM Pena memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana yang mungkin akan terjadi. KIM Pena bekerjasama dengan kepala desa, senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif kepada tetangga, warga, RT, RW, Kasun, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD dan perangkat

desa terutama pada musim penghujan dimana ancaman bahaya bisa datang secara tidak terduga.

Kontribusi KIM Pena melalui prakarsa inovatif yang dihasilkan adalah mengudaranya radio komunitas sebagai media komunikasi dan majalah “DESAKU” sebagai potret kegiatan masyarakat yang terdokumentasikan. KIM Pena hadir melalui berita, informasi, berbagi peran, menguatkan akses, mendorong diskusi, dan mengimplementasikan peran sebagai agen informasi. Radio komunitas sering dipergunakan oleh warga sebagai media komunikasi melalui pesawat HT di 143480 – radio 143770 dan frekuensi modulasi (FM) 93.5 Mhz. Radio komunitas merupakan alat komunikasi yang efektif dalam mengakomodir kebutuhan informasi yang bersifat serta merta. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 10, pengertian informasi serta merta adalah suatu informasi yang harus ada, tanpa penundaan dan dapat tersampaikan kepada target yang dituju pada saat yang tepat. Apabila informasi serta merta tidak sampai kepada obyek tujuan secara tepat waktu, akibat dapat mengancam hajat hidup orang banyak maupun ketertiban umum. Informasi yang bersifat serta merta antara lain: informasi tentang bencana alam, kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, dan informasi tentang rencana gangguan terhadap fasilitas publik, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dua jenis informasi yang lain, adalah: (1) informasi yang bersifat setiap saat yaitu informasi yang harus disediakan oleh lembaga publik dan diberikan pada saat ada permintaan terhadap informasi tersebut (contoh blangko permintaan informasi pada lampiran. Informasi-informasi yang berada dalam kategori ini bersifat pasif dan harus disiapkan; (2) informasi yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat tertentu dan tidak dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU KIP, menghambat proses penegakan hukum sifatnya dirahasiakan

Sedangkan majalah “DESAKU” adalah produk KIM Pena yang menemani proses literasi warga sebagai media informasi berupa berita dalam bentuk cetak. Majalah ini telah terbit bulan april 2016 untuk edisi ke-2 dan dimaksudkan menjadi media untuk berbagi peran, menguatkan akses, mendorong diskusi, mengimplementasikan peran sebagai agen informasi, menguatkan jaringan, sekaligus menjembatani kebuntuan informasi warga. Konten majalah berisi berita tentang: produk kreatif berbasis lokal, kerajinan, pelatihan, gapoktan, informasi titik longsor melalui sistem penginderaan, infografis potensi desa,

kegiatan gotong royong atau *ungkrungan*¹ warga, maupun berita lain untuk menggugah partisipasi warga.

Peningkatan literasi warga melalui wadah komunitas KIM Pena semakin berkembang seiring dengan internet masuk desa. Komunitas yang dimotori oleh dua JW dan sekaligus pengurus KIM Pena ini memanfaatkan TIK yang hadir dengan membuat website dengan laman <http://kimpena.kabpacitan.id>. Pemanfaatan website disamping sebagai media informasi desa, sekaligus sebagai sarana untuk mengakomodir warga desa yang merantau, berdomisili di tempat lain namun ingin memberikan kontribusi kepada desa asal. Kepedulian pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap keberlangsungan KIM di beberapa desa dilaksanakan dengan memberikan pembinaan yang difasilitasi oleh Diskominfo. Pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan kepada anggota KIM yang terdiri dari berbagai latar belakang: ibu rumah tangga, guru, PTT, petani, tukang dan lainnya. Dampak pembinaan yang dilakukan kepada KIM Pena adalah peringkat 5 dari KIM Jawa Timur yang diumumkan oleh Kepala Diskominfo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 2018. Penilaian KIM Pena dilakukan oleh Mahbub Junaidi, anggota KI Provinsi Jawa Timur saat melakukan “Monev” PPID Tahun 2018 di Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan tanggal November 2018 dengan mengatakan,

"Pemenuhan akan informasi sudah bisa diakses secara terbuka di website desa, seyogyanya memang harus seperti ini, kita harapkan monitoring secara fisik juga memenuhi. Kesadaran perangkat desa dan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi sudah sangat bagus. Kami mencermati adanya kepedulian dari warga masyarakat untuk secara sukarela membangun akses akan adanya keterbukaan informasi publik di desa Ngumbul ini dengan pemerintah desanya, seperti pelibatan KIM dalam menyuguhkan informasi tentang desanya, adanya Majalah Desa kendati hanya berbentuk E-Paper karena adanya keterbatasan anggaran untuk mencetaknya, saya pikir ini sebuah inisiasi yang harus dikembangkan desa-desa yang lain”.

Identifikasi aktor yang terlibat pada moment of intereseement ini dilakukan, baik kepada aktor manusia maupun aktor non-manusia. Polarisasi antara aktor manusia, yaitu warga yang merespon ajakan dan warga yang menolak inisiasi terjadi pada tahap ini. Adapun aktor non-manusia yang terlibat dalam pembentukan jaringan-aktor pada tahap ini adalah: KIM Pena, majalah “DESAKU”, website KIM Pena, dan radio komunitas.

¹Ungkrungan yaitu gotong royong bergilir di musim tertentu seperti musim mencangkul sawah maupun ladang.

4.3 Moment of Enrollment (E)

Pada *moment of enrollment*, resistensi terhadap jaringan-aktor yang terbentuk mulai terasi dan pengaruhnya semakin berkurang. Para aktor saling mendelegasikan peran dan wewenang di antara aktor satu dengan aktor lain. Pada tahap ini KIM Pena mampu menjadi mitra desa dan menginisiasi pemerintah desa Ngumbul agar memiliki website. Dua orang JW mengusulkan kepala desa untuk membeli domain dan hosting yang dapat menampilkan profil desa, sejarah desa, visi-misi, lembaga-lembaga di desa Ngumbul, berita seputar desa. Website Desa Ngumbul resmi aktif dengan laman <http://ngumbul.desa.id> pada Pebruari 2016. KIM Pena menunjukkan eksistensinya dengan melakukan edukasi literasi kepada masyarakat dan memproduksi berita-berita desa. Kepala desa, perangkat desa, dan komunitas KIM Pena melakukan pembinaan kepada seluruh warga melalui forum RT, RW terhadap pentingnya data penduduk, data potensi desa, transparansi keuangan dan sebagainya. Setelah didapat kesamaan cara pandang terhadap pentingnya data, menjalin kebersamaan, dan kekompakan, maka pengumpulan data dilakukan. Sebelum data diterima operator, proses pengecekan data dilakukan berulang-ulang untuk menjamin keabsahan identitas data kependudukan. Proses pengecekan data dimulai dari RT, RW, Kasun dan dilaksanakan verifikasi di kantor desa dengan oleh tim yang telah ditunjuk kepala desa. Dalam berbagai kesempatan Kepala Desa Ngumbul selalu mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya pengumpulan data tersebut, Tumijan mengatakan,

“Tidak ada kemewahan di desa kita, tidak ada apa-apa di desa ini, yang ada hanya kesederhaan, kebersamaan, dan kekompakan. Dan rupa-rupanya ini agak retak oleh program-program raskin, pembagian hewan ternak, paket bedah rumah atau yang lainnya. Ungkrungan mulai ditinggalkan, gotong-royong hilang maknanya. Saya berharap dengan pendataan ini kita akan memiliki data tunggal, data valid dan senantiasa diperbaharui. Oleh karena itu saya mohon kepada ketua-ketua RT, RW, Kasun untuk teliti dan jangan sampai ada data kependudukan yang tidak valid. Cek n ricek sebelum dikumpulkan ke mas Dani. Harapan besar saya dengan kerja keras kita berbulan-bulan ini, kita semua seluruh warga desa kembali rukun, kembali kepada budaya kita, identitas kita, dan kearifan lokal kita. Biarlah data kita nanti yang akan bicara. Semoga semuanya ikhlas dan siapapun yang akan mendapatkan program-program dari pemerintah, bantuan atau pelatihan semoga tepat sasaran”.

Inisiasi terus dilakukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan akibat hilangnya dokumen seperti: dokumen kependudukan, data monografi maupun data penting lain karena longsor, rusak, hilang dan sebagainya. Inisiasi dilakukan oleh OPP dan berupaya mentranslasikan kepada aktor-aktor

lain baik warga, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, BPD, LMD, RT, RW dan kepala dusun.

4.4 Moment of Mobilization (M)

Pemanfaatan SID di desa Ngumbul mendapatkan dukungan dari KOMPAK (Bapedda), Diskominfo, dan Dinas PMD Kabupaten Pacitan dengan memperkenalkan aplikasi SID KOMPAK memiliki peran dalam memperkenalkan aplikasi SID dari CRI Yogyakarta sebagai sistem informasi layanan olah data desa sekaligus sebagai website desa yang dapat dipublikasikan: berita, agenda, produk hukum, perencanaan dan penganggaran, laporan, panduan pelayanan publik, termasuk potensi dan produk usaha. Proses migrasi dari website desa <http://ngumbul.desa.id> ke laman <http://ngumbul.kabpacitan.id> mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Pacitan dengan fasilitas migrasi gratis sekaligus infrastruktur server yang tersimpan kantor Diskominfo Kabupaten Pacitan.

Untuk mendukung penggunaan SID, Diskominfo dan KOMPAK Kabupaten Pacitan melaksanakan pelatihan kepada operator di beberapa desa. Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 11 Juli 2017 ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya sebuah SID yang terkait dengan keterbukaan informasi dan mendukung pelayanan administrasi yang mudah dan cepat. Irwandi, pengurus KOMPAK Kabupaten Pacitan mengatakan,

"Sepuluh desa yang kami dampingi telah memanfaatkan SID untuk mendukung pelayanan administrasi yang mudah dan cepat di desanya masing-masing".

Penerapan SID di Desa Ngumbul mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan surat keputusan panitia lomba website SID 8 September tahun 2017, nomor: 861/Panitia-PP/2017 sebagai "Juara I Website Desa Ngumbul Kec. Tulakan dengan laman <http://ngumbul.kabpacitan.id>. Prestasi penerapan SID di Desa Ngumbul berikutnya adalah "Juara 2 PPID Award" kategori desa terinformatif oleh KI Propinsi Jawa Timur.

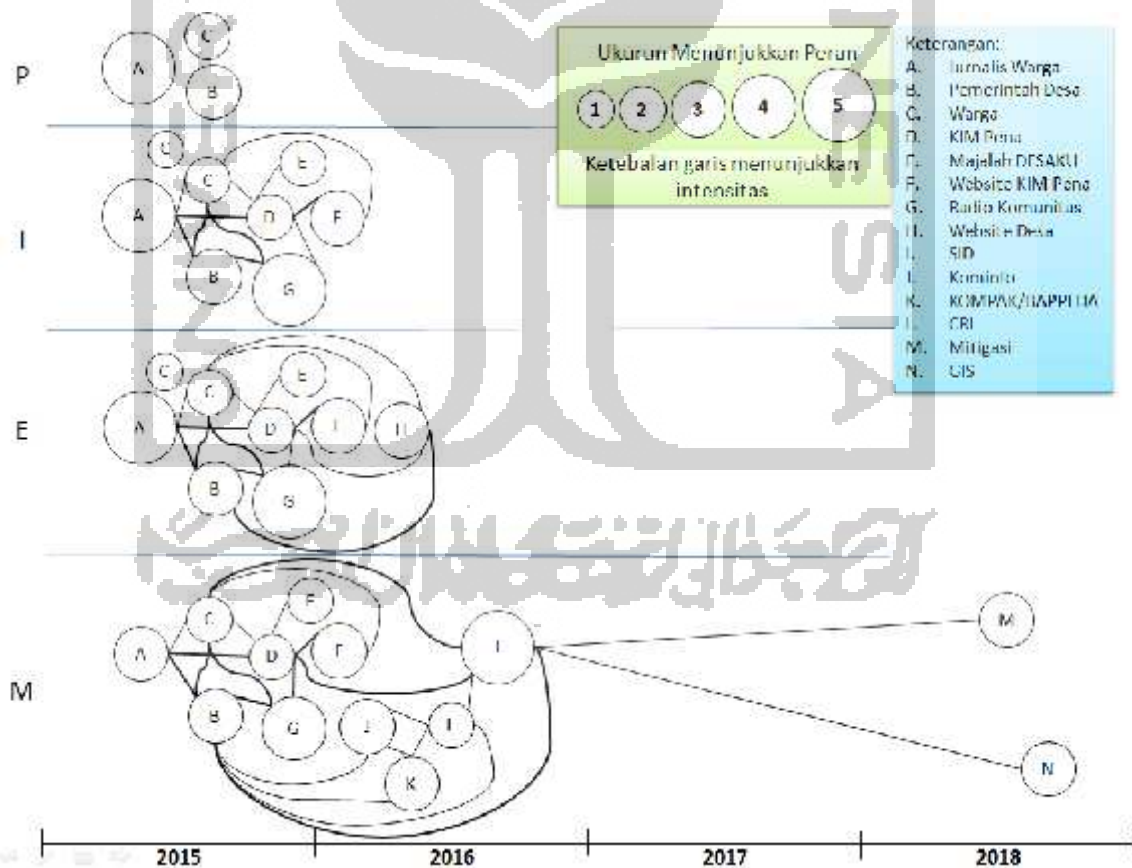
Perangkat desa terus melakukan peningkatan standar layanan melalui SID kepada warga. Salah satu yang dilakukan adalah mengintegrasikan mitigasi kebencanaan dengan mengumpulkan data warga terdampak, lokasi terdampak, potensi rawan bencana serta tingkat kemampuan warga dalam hal kebencanaan ke dalam SID. Dengan data-data yang tersimpan pada SID, warga dapat belajar bagaimana menghadapi bencana dengan melihat berbagai tips menghadapi bencana. Bahkan kesiap-siagaan yang dilakukan oleh desa

Ngumbul, pemerintah daerah memberikan kepercayaan sebagai desa tanggung bencana (Destana) yaitu desa yang memiliki kemandirian untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

Peningkatan fungsi SID lainnya adalah integrasi GIS ke dalam sistem informasi. GIS adalah adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, menampilkan informasi bereferensi geografis dan memiliki informasi spasial, seperti melakukan pemetaan potensi desa, persil, perencanaan pembangunan, dan pemetaan aset desa.

4.5 Translasi Aktor Jaringan

Berdasarkan pembahasan pada sub-bab 4.1 tentang problematik di desa Ngumbul (P) sebagai *moment of problematization*, sub-bab 4.2 tentang *moment of intereseement* (I), sub-bab 4.3 tentang *moment of enrollment* (E) dan sub-bab 4.4 tentang *moment of mobilization* (M), maka translasi jaringan-aktor yang terbentuk dijelaskan dalam Gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 Translasi model *actor network theory*

Sebagaimana gambar 4.3, *moment of problematization* (P) merupakan awal translasi yang terjadi dalam membentuk jaringan-aktor baru, meskipun pada tahap ini belum terbentuk sebuah jaringan. Hasil identifikasi menemukan 3 (tiga) aktor, yaitu aktor “A” (JW), aktor “B” (Pemdes), dan aktor “C” (warga). Ketiga aktor saling menjajaki untuk permasalahan kritis yang dihadapi oleh desa Ngumbul. Aktor “A” sebagai aktor utama (OPP) melakukan inisiasi kepada aktor “B” yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, perangkat desa. Aktor “C” juga melakukan inisiasi kepada warga, RT, RW, Kasun, karang taruna, BPD, PKK dan tokoh masyarakat (hubungan kemasyarakatan desa berdasarkan model ANT sebagaimana pada gambar 4.2). Inisiasi dilakukan oleh OPP secara berkesinambungan sejak bulan april 2015 sampai desember 2015 agar mendapat perhatian dari para aktor dan mendiskusikan solusi antisipatif yang tepat.

Pada *Moment of interessement* (I), OPP melakukan dorongan lebih kuat kepada aktor “B” dan aktor “C”, serta melibatkan aktor baru dalam membentuk jaringan-aktor dalam keberhasilan penerapan SID. Pada tahap ini terjadi polarisasi dari aktor “C” yang merespon inisiasi dan aktor yang menolak. Aktor “C” yang menolak terlihat berdiri sendiri dan berada di luar jaringan-aktor yang terbentuk. Pada tanggal 16 desember 2015, keberhasilan inisiasi mulai terlihat dimana secara aklamasi berdasarkan hasil mufakat warga desa, sepakat membentuk aktor “D” (KIM Pena) sebagai wadah aspirasi dan penyampai informasi. Aktivitas aktor “D” membuahkan hasil dengan lahirnya dua aktor baru, yaitu aktor “G” (radio komunitas) pada minggu ke-3 bulan desember 2015 dan aktor “E” (majalah “Desaku”) terbit edisi pertama pada akhir Desember 2015. Aktor “G” merupakan media komunikasi yang efektif dalam mengakomodasi informasi-informasi penting, informasi yang bersifat serta merta, informasi yang bersifat setiap saat maupun informasi yang dikecualikan. Intensitas komunikasi antar aktor dapat dilihat berdasarkan ketebalan garis pada gambar 4.3, dimana garis yang lebih tebal menunjukkan intensitas yang lebih tinggi dalam melakukan komunikasi dan koordinasi. Pemanfaatan informasi dan peningkatan literasi warga semakin berkembang setelah lahir aktor “F” (website KIM Pena) pada akhir desember 2015. Aktor “F” merupakan tempat mem-*publish* dan menampilkan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat seiring jangkauan akses internet masuk desa. Aktor “F” juga hadir untuk mengakomodir warga desa yang merantau atau berdomisili di tempat lain.

Pada *moment of enrollment* (E) terjadi dua perubahan. Pertama, aktor “C” yang menolak semakin berkurang dan meningkatnya penggunaan aktor “G” sebagai media

koordinasi. Kedua, aktor “D” menjadi inisiator lahirnya aktor “H” (website desa) pada bulan pebruari 2016 untuk memperbaiki kualitas data.

Moment of mobilization (M) memunculkan beberapa aktor baru. Aktor “I” (SID berbasis website) dibangun untuk menggantikan peran aktor “H” (website desa) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan aktor “I”, diawali dengan workshop sistem SID pada bulan mei 2016, kerjasama aktor “J” (diskominfo) dan aktor “K” (Bapedda-kompak) yang menghadirkan aktor “L” (CRI Yogyakarta) sebagai pengembang aplikasi. Translasi mencapai kestabilan pada tahap ini, aktivitas para aktor berjalan pada peran masing-masing. Pada momen ini terjadi penurunan peran aktor “G” dan peran utama digantikan oleh aktor “I” yang memiliki fungsi *front-end* dimana website dapat diakses oleh warga dan fungsi *back-end* yang hanya bisa diakses oleh administrator sistem. Sampai pertengahan tahun 2017, Aktor “I” menjalankan dua fungsi, yaitu (1) pelayanan administrasi kependudukan seperti: permohonan e-KTP, KK, laporan kelahiran, laporan kematian, pindah tempat, surat keterangan usaha dan SKTM oleh aktor “I” menjadi lebih cepat; (2) aktor “I” dimanfaatkan untuk *publish* berita, seperti: berita pelatihan keterampilan, agenda kegiatan desa, berbagai bantuan bagi warga, realisasi penggunaan anggaran, rencana anggaran tahun berikutnya. (lihat lampiran 13 sampai lampiran 18).

Untuk meningkatkan fungsi aktor “I”, tanggal 11 juli 2017, diskominfo dan KOMPAK kabupaten Pacitan melaksanakan pelatihan operator SID versi 3.10 untuk meningkatkan fungsi manajemen module pengguna dan manajemen modul website. Kepercayaan terhadap aktor “I” semakin meningkat dengan adanya kunjungan advisor KOMPAK dari Australia pada tanggal 2 agustus 2017 ke Desa Ngumbul. Victor Boniti mengatakan,

“Saat ini desa dampingan KOMPAK sudah jauh lebih tertata dalam semua bidang, salah satunya menyangkut penguasaan SID berbasis teknologi”.

Aktor “I” mendapat sambutan dari fasilitator KOMPAK kabupaten Lumajang dengan mengundang 3 operator SID desa Ngumbul menjadi narasumber dalam penerapan olah data SID berbasis online tanggal 5-7 september 2017. Apresiasi juga muncul dari Kabupaten Pacitan, tanggal 8 september 2017 desa Ngumbul mendapatkan “Juara 1” lomba SID Award yang diselenggarakan oleh diskominfo dan mendapat kunjungan oleh tim KOMPAK yang dihadiri Michelle Lowe, Counsellor of Human Development section, Australian Embassy di sela-sela peluncuran program Kampung UKM Digital yang dibuka

langsung oleh Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, tanggal 4 oktober 2017 di PLUT Pacitan.

Tanggal 12 november 2017, 11 operator SID dari Kabupaten Pacitan belajar bareng di Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dengan pendampingan oleh Supriyono (kepala bidang IT kominfo), Sutarman (Bappeda); Irwandi (fasilitator KOMPAK). ToT ini memberi pelajaran kepada para peserta bahwa SID cukup dilink ke website Disdukcapil, data angka kemiskinan akan bergerak secara otomatis. Menurut Sutarman, olah data kemiskinan yang saat ini menggunakan BDT akan lebih tervalidasi dan mudah menentukan sasaran.

Kerja keras aktor “B” (pemerintah desa Ngumbul) dalam meningkatkan pelayanan kepada warga melalui aktor “I” yang terus ditingkatkan, mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur sebagai “Juara 2 PPID Award” kategori desa terinformatif pada tanggal 18 desember 2017 di Surabaya. Selasa, 6 Pebruari 2018 Bappenas bekerjasama dengan OPD Kabupaten Pacitan melakukan studi lapang “Monev”, sebagai bentuk apresiasi terhadap hal tersebut dan pencocokan data pengolahan BDT dalam program penanggulangan kemiskinan pada aktor “I”.

Upaya aktor “B” untuk menciptakan keterbukaan informasi publik dilakukan dengan menyajikan informasi, seperti: infografis realisasi APBDes 2017, infografis BUMDes dan jenisnya, infografis pedoman pelaksanaan UU Desa, infografis prioritas penggunaan dana desa, infografis 4 program prioritas percepatan desa, infografis NAWACITA mewujudkan kemandirian desa, pandangan pengecualian dan permohonan informasi (lihat lampiran 16-lampiran 18).

Untuk menjaga kualitas penerapan SID di Desa Ngumbul, tanggal 2 maret 2018 “Monev” dilakukan oleh dinas PMD dengan harapan aktor “I” menjadi ujung tombak dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Peningkatan literasi kepada aktor “C” juga dilakukan, oleh aktor “D”. Bukti peningkatan tersebut, 3 juli 2018 aktor “D” memperoleh peringkat 5 KIM se-Jawa Timur yang diumumkan oleh Diskominfo Propinsi Jawa Timur. Adapun pembinaan terhadap aktor “D” secara periodik dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pacitan, seperti tanggal 10 juli 2018 untuk menumbuhkan budaya literasi bagi aktor “C”.

Kepercayaan dari kabupaten lain semakin tumbuh, dengan undangan kepada operator SID Desa Ngumbul sebagai narasumber dalam kegiatan “Outing desa”, di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, 16-18 juli 2018. Bahkan, 23 agustus 2018, KOMPAK PM Propinsi Jawa Timur bersama tim KOMPAK Lumajang,

Trenggalek, dan Pacitan melakukan kunjungan “Outing SID” di Desa Ngumbul. Dan pada bulan juli 2018, hadir aktor “M” (mitigasi bencana) yang telah terintegrasi dengan aktor “T”. Data-data kebencanaan, seperti: data warga terdampak, lokasi terdampak, potensi rawan bencana serta tingkat kemampuan warga dalam hal kebencanaan semua telah menyatu ke dalam SID. Pada bulan september 2018, lahir aktor “N” (GIS) yang dimanfaatkan dalam pemetaan potensi dan perencanaan pembangunan di desa, pemetaan kebencanaan, pemetaan aset desa, pemetaan persil tanah dan lain-lain.

4.6 Dampak Keberhasilan Penerapan SID

Temuan tentang dampak keberhasilan penerapan SID berbasis website di Desa Ngumbul berdasarkan hasil observasi dan wawancara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dampak internal dan eksternal. Dampak internal adalah dampak keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Ngumbul yang akan dijelaskan berikut:

a. Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Warga

Di negara demokrasi, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan hak memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sesuai dengan UU KIP, menurut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Pada presentasi di hotel Santika Surabaya, 11 januari 2018 dalam rapat koordinasi tim teknis Propinsi Jawa Timur, Miskun menyampaikan,

"Sangat beda jauh, sebelum dan sesudah kita menerapkan SID. Dengan penerapan SID, proses kerja pelayanan desa lebih efisien, penyimpanan data dan atribut kependudukan lebih efektif, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk berita yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga sebagai bentuk keterbukaan informasi pemdes kepada masyarakat. Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik”.

Upaya Pemdes untuk membangun akuntabilitas telah dilakukan, salah satu yang telah dilakukan adalah dengan pelaporan pemanfaatan anggaran kepada publik melalui baliho, papan pengumuman, maupun website. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Ngumbul dalam kegiatan Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) di Balai Desa Ngumbul. SEPOLA ini diinisiasi oleh Tim KOMPAK bekerjasama dengan perkumpulan Inisiatif Bandung dan The Asia Foundation (TAF) berlangsung selama 4 hari, tanggal 24-27 Januari 2018. Tukijan mengatakan,

"Seperti halnya yang kami lakukan di desa Ngumbul ini, pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin membuka akses keterbukaan informasi publik, baik terkait penerimaan dan penggunaan anggaran".

Keterbukaan informasi juga disampaikan oleh salah satu warga dusun Krajan. Uripto mengatakan,

"Semuanya serba terbuka, tercatat secara online. Semua agenda kegiatan yang dilakukan di desa kami dapat dilihat, siapa saja bisa cek tentang: pelatihan, bantuan-bantuan, kegiatan desa, unkrungan, bahkan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun berikutnya juga bisa diambil secara online. Sekarang masyarakat jadi lebih bersemangat dengan kegiatan di desa kami. Karena tidak ada dusta di antara kita".

Hal senada disampaikan oleh Kasun Jeruk tentang keterbukaan informasi publik dengan mengatakan,

"Bicara masalah keterbukaan informasi, saya kira dengan pelayanan menggunakan alat-alat canggih yang ada di kantor desa, hal itu sudah tercapai. Semua kegiatan yang dilakukan, semuanya bisa dilihat di situs KIM atau situs desa. Setiap warga desa punya akun dan password masing-masing untuk mendapatkan pelayanan khusus bagi warga desa secara online. Rencana anggaran desa, rencana pembangunan, realisasi dana desa, semuanya bisa dibaca bahkan di kantor desa dipasang beberapa banner yang menginformasikan tentang realisasi anggaran, peta tematik rawan bencana".

Hal lain yang dilakukan oleh Pemdes untuk menciptakan keterbukaan informasi ialah dengan menyiapkan beberapa blangko, seperti: blangko pengajuan permohonan, form permohonan informasi, form pemberitahuan tertulis, form pernyataan keberatan atas permohonan informasi, surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi. (lihat lampiran 19)

b. Data Kependudukan yang Berkualitas

Pemerintah Desa Ngumbul memanfaatkan potensi SID ini untuk memperbaiki kualitas data kependudukan yang senantiasa menimbulkan permasalahan antar warga, antar dusun karena validitas data yang tidak selalu *update*. Munculnya potensi keretakan gotong-royong oleh karena pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran, perbedaan data kependudukan antara KTP, ijazah, akta lahir dan permasalahan-permasalahan kependudukan yang lain. Pada tahap ke-4 yaitu *moment of mobilization*, permasalahan kependudukan di desa Ngumbul telah terselesaikan melalui layanan SID. Salah seorang warga desa mempunyai kesan yang mendalam terhadap penerapan SID dengan mengatakan,

“Saya hampir saja batal berangkat umroh karena ada perbedaan data di akta lahir, KTP dan KK saya yang itu tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Di tengah kebingungan tersebut, saya mencoba berkonsultasi ke pak RT. Ternyata pak RT punya semua arsip data warganya. Kata pak RT, itu hasil kerja bareng-bareng seluruh perangkat selama beberapa bulan. Karena pak kepala desa menginginkan data yang benar-benar valid. Dan jika ada perubahan satu warga saja maka tiap-tiap 4 bulan sekali ada pemutahiran data. Dan kita semua, RT, RW, dan Kasun juga dapat fotocopy-an untuk menggantikan arsip yang lama. Syukur alhamdulillah dengan pelayanan menggunakan komputer di desa, saya jadi berangkat umroh’.

Tentang data yang berkualitas, Miskun dalam kegiatan Outing SID Tim Kompak Provinsi, Kabupaten Lumajang Dan Trenggalek di Ngumbul, Kamis 23 Agustus 2018 mengatakan,

“Pengelolaan DBT awalnya adalah data mentah yang perlu dilakukan cek and ricek oleh pemerintah desa. Setelah data BDT tersebut turun kami segera melakukan klarifikasi ke lapangan, kami lakukan validasi data secara *door to door* dengan dibantu perangkat desa dan warga, sehingga kami bisa menyakinkan kalau data yang kita validasi benar-benar valid dan bisa dijadikan pijakan untuk penyaluran program”. Miskun menambahkan bahwa, “Saat ini, pemerintah desa telah mampu melakukan validasi data secara berjenjang. Data-data tersebut terus kita lakukan update secara berkala setiap 6 bulan sekali, sehingga kita benar-benar memiliki data yang valid dan terupdate”.

c. Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat juga merasakan kemudahan mengurus surat-menyurat dan waktu pengurusan yang lebih singkat. Pengecekan data diri dapat dilaksanakan secara mandiri oleh semua warga secara online melalui akun masing-masing.

Hamdani, koordinator pelaksana operasional dalam struktur organisasi PPID desa Ngumbul mengatakan,

“Berkah adanya komputer pelayanan di ruang PPID ini, membuat kerja jadi lebih efisien, sekarang hampir tidak ada keluhan dari warga berkenaan dengan pengajuan permohonan surat-menyurat. Contohnya: permohonan pembuatan KTP, waktu proses sampai cetak hanya perlu 3 – 6 menit. Untuk surat kematian memang butuh waktu 3-5 hari karena untuk pengecekan kebenaran pengajuan permohonan”.

Penerapan SID di Desa Ngumbul mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten dengan meraih Juara 1 PPID Award 2017 dan Juara 2 PPID Award 2017 kategori desa terinformatif oleh KI Propinsi Jawa Timur. Manfaat yang dapat diambil dengan prestasi tersebut, meskipun desa yang letaknya jauh dari pusat kota (lihat lampiran 9) lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten. Berikut ini beberapa perhatian yang diberikan:

1. Pelatihan kerajinan teko dari tempurung kelapa.
2. Pelatihan pupuk organik untuk penggiat karang taruna.
3. Pelatihan SID versi 3.10.
4. Pelatihan kebencanaan Linmas desa (lampiran 13).
5. Program 45 rumah bagi RTLH (rumah tidak layak huni) oleh Dinas PMD.
6. Program pemugaran warga miskin di Dusun Krajan oleh Pemerintah Desa Ngumbul.
7. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui sapu lidi, kerajinan program Grindulu Mapan oleh KOMPAK, Dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Pacitan, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan.
8. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh UPT Dinas kesehatan Kecamatan Tulakan.
9. Berdayakan masyarakat miskin melalui PKH (program keluarga harapan) oleh Dinas sosial.
10. Penyuluhan tentang anak dan remaja oleh PKK Desa Ngumbul bekerjasama dengan Dinas PPKB & DPPPAA Kabupaten Pacitan.
11. Bantuan hewan ternak dan alat pembuatan kue di balai Desa ngumbul oleh Dinas PMD Kabupaten Pacitan.
12. Pembinaan KIM Pena oleh Diskominfo Kabupaten Pacitan.
13. Pembinaan desa tangguh bencana oleh BPBD Kabupaten Pacitan.
14. Pelatihan peningkatan kapasitas kepengurusan Bumdes oleh Camat Tulakan.
15. Layanan mandiri di website Desa Ngumbul (lihat lampiran 20)

d. Komunikasi dan Koordinasi dengan Lembaga Supra Desa

Sebagaimana pernyataan Kepala Desa Ngumbul (hal. 35) keinginan mewujudkan data tunggal dan data yang valid yang linear dengan paparan Miskum saat presentasi yang dilakukan di hotel Santika Surabaya, 11 Januari 2018 dalam rapat koordinasi tim teknis Propinsi Jawa Timur, (a. keterbukaan informasi publik, hal 41) pengelolaan data dan atribut kependudukan menjadi lebih efektif. Pernyataan Kepala Desa dan Ketua KIM Pena di atas menunjukkan bahwa Desa Ngumbul memiliki data matang yang siap dipertanggungjawabkan kepada struktur pemerintahan di atasnya.

Pelaporan kepada supra desa yang bersumber dari data kependudukan berbasis SID menjadi lebih tertib. Hal ini dapat dilihat dengan adanya “Monev” yang dilakukan oleh Dinas kominfo, Dinas PMD, KOMPAK Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dan Advisor KOMPAK dari Australia. Jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga supra desa menjadi lebih baik dan adanya kepercayaan kepada Desa Ngumbul.

e. Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel

Penerapan SID mampu mewujudkan kemampuan mekanisme pemerintahan yang bersih, meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur desa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan manajemen data informasi yang senantiasa di *update*. Rohimah selaku administrator website mengatakan,

"Hadirnya sistem informasi desa berbasis teknologi menjadi salah satu pilihan untuk mencapai tertib administrasi desa, informasi yang dihasilkan lebih akurat, berkualitas, tepat waktu, sehingga lebih efektif dan efisien masyarakat dapat mengakses seluruh data informasi tentang aktivitas yang ada di desa, website juga terintegrasi akun sosial, majalah desa, memudahkan pelayanan, surat-menyurat lebih cepat dan mudah, informasi senantiasa *up to date* dan dapat diakses warga ngumbul yang berada di perantauan”.

Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menengah desa (RKJM Desa), Infografis realisasi APBDes tahun 2017 dan rencana APBDes tahun 2018 yang telah dipublikasikan di website desa, dipasang pada tempat-tempat strategis untuk mewujudkan transparansi anggaran dan kepercayaan warga. Pernyataan kepala desa, Kasun, dan beberapa warga dari hasil wawancara, menunjukkan kemudahan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan tersedia di website desa dan di Kantor desa merupakan bentuk transparansi dan

akuntabilitas yang dikembangkan Pemerintah Desa sehingga mampu mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.

f. Desa Tangguh Bencana

Kesiap-siagaan yang dilakukan oleh Desa Ngumbul mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah dengan memberikan identitas sebagai desa tangguh bencana (Destana) yaitu desa yang memiliki kemandirian untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana (lihat lampiran 13).

Adapun dampak eksternal memberikan pengaruh kepada seluruh desa di Kabupaten Pacitan, desa dan kecamatan lain dari kabupaten di Jawa Timur maupun propinsi lain seperti:

a. Replikasi SID

Upaya memperluas kapasitas penerapan SID di desa-desa lain di Kabupaten Pacitan, diskominfo melakukan pelatihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa KKN Universitas Negeri Surakarta dengan tujuan untuk mendampingi operator-operator desa yang ada di lokasi KKN di Kecamatan Punung. Menurut Supriyono, Kabid TI Diskominfo Pacitan mengatakan,

“Dari kegiatan pelatihan yang dilakukan minggu lalu di ruang PPID, peserta pelatihan kita ajak untuk melakukan studi lapang di Desa Ngumbul yang sudah menerapkan SID dalam pelayanan di desa, harapannya selain mendapat teori juga peserta bisa secara gamblang melakukan kolaborasi penerapan SID yang sudah berjalan”.

Hal senada disampaikan oleh Andriyanto, S.Kom selaku Kasi pengelolaan aplikasi dan sumberdaya, Diskominfo Kabupaten Pacitan, bahwa akhir tahun 2018 seluruh desa sejumlah 166 desa di Kabupaten Pacitan telah menerapkan menerapkan SID. Termasuk desa-desa dampingan KOMPAK di berbagai kota di Jawa Timur, propinsi lain yang telah melakukan studi tiru SID di Desa Ngumbul pun telah melakukan replikasi SID.

b. Narasumber dan Studi Tiru SID

Tercatat beberapa Tilik SID di desa Ngumbul dilakukan oleh, (1) KOMPAK kabupaten Trenggalek, kabupaten Malang, kabupaten Lumajang; (2) Studi tiru oleh 34 KIM kabupaten Wonogiri; (3) Studi tiru oleh Camat Manyaran Kabupaten Wonogiri beserta staf kantor kecamatan. Jumat, 28 November 2018, Camat Manyaran Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iman Santoso S.Sos.Mp dalam sambutannya menyampaikan hal berikut,

"Terus terang kami ingin banyak belajar pengelolaan SID di desa Ngumbul ini untuk nantinya bisa kita tularkan di desa-desa di kecamatan Manyaran, bapak, ibu staf Kecamatan Manyaran jangan minder dan malu untuk belajar, kendati ibarat pepatah "Kebo Nyusu Gudel", semangat belajar dan terus belajar harus terus kita pupuk bersama".

Dalam festival "Desa Nusantara", di Kabupaten Bondowoso, Pemdes Ngumbul menjadi narasumber dalam penerapan SID. Mashudi salah satu operator SID desa Ngumbul mengatakan,

"Banyak kebijakan dan regulasi dibuat pasca pemberlakuan UU Desa yang justru membuat pemerintah desa kelimpungan bahkan banyak yang gagap dan bingung. Ditengah kebingungan itulah, kami mengambil inisiasi dan peran dalam menggagas penerapan SID di desa kami, ternyata setelah SID kami terapkan banyak hal yang bisa kita pelajari dan lakukan, tak sekedar memanfaatkan SID sebagai media informasi desa namun lebih dari itu sebagai database desa dan pelayanan publik. Mengambil prakarsa-prakarsa baru agar SID yang kami terapkan bisa lebih bermanfaat dan mampu mengambil peran maksimal dalam pelayanan publik, mendorong keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan inisiasi-inisiasi lain agar SID ini bisa terus berkelanjutan".

c. Monitoring dan Evaluasi

PPID desa diharapkan bisa menjalankan fungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, baik dalam hal pelayanan informasi maupun dokumentasi. Hal itu disampaikan Mahbub Junaidi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat melakukan Monev PPID 2 November 2018 di Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan. Monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak: advisor KOMPAK dari Australia, diskominfo kabupaten Pacitan, dinas PMD kabupaten Pacitan, dan KI Propinsi Jawa Timur harus membentuk kesadaran seluruh stakeholder desa Ngumbul terhadap keterbukaan informasi.